KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Migor Mendadak Melimpah, Kemarin Ke Mana, Sengaja Ditimbun?
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Migor Mendadak Melimpah

Kemarin Ke Mana, Sengaja Ditimbun?

PEMERINTAH mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 pada Rabu (16/2).

Dengan dicabutnya HET, harga minyak goreng akan disesuaikan dengan mekanisme pasar. Akibatnya, harga minyak goreng kemasan naik hingga nyaris 2 kali lipat.

Anehnya, kenaikan minyak goreng ini diikuti dengan pasokan yang berlimpah di minimarket, pasar tradisional, dan supermarket.

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menduga ada praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, saat ini minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko dengan harga melambung setelah (HET) dicabut.

"Pasokan minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko, bahkan dengan harga mencapai Rp 25 ribu/liter. Ini berarti ada yang sengaja menahan pasokan alias menimbun, tunggu HET dicabut baru pasokan dikeluarkan," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurut Baidowi, hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada masalah dari sisi pasokan minyak goreng. Tetapi distribusinya tersendat karena ada praktik penimbunan.

"Kepolisian dan satgas pangan harus melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokan langsung berlimpah satu hari pasca pengumuman HET dicabut," usil Baidowi.

Baidowi mengingatkan, pemerintah tak bisa melepas harga minyak goreng kemasan ke pasar bebas atau sesuai harga pasar. Sebab, banyak orang berpendapatan pas-pasan yang mengonsumsi minyak goreng kemasan, termasuk warung-warung makanan.

Dia bilang, tingginya permintaan minyak goreng jelang bulan Ramadan justru dimanfaatkan oleh konglomerat sawit untuk meraup untung besar-besaran.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai, keputusan menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar menandakan pemerintah kalah menghadapi tekanan pengusaha minyak goreng.

"Para penimbun yang menahan migor murah akan sorak-sorai merayakan kemenangan ini. Mereka sambil mencibir inkonsistensi kebijakan Pemerintah serta Mendag yang menjilat ludah sendiri," kata Mulyanto dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Mulyanto, tidak aneh kalau pengusaha dapat mendikte pemerintah, karena pasar minyak goreng bersifat oligopolistik. Dari data Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha, pasar minyak goreng dari hulu ke hilir, termasuk terintegrasi ekspor, dominan dikuasai hanya oleh 4 produsen.

"Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatur produksi dan harga dalam pasar yang bersifat oligopolistik ini. Karenanya mana sudi mereka diganggu," ujar politikus PKS ini. ■ TIF